





**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/474 /2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025;
- KETIGA** : Sistematisa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - BAB V : PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 16 Agustus 2024



Pj. BUPATI SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 474 /2024
TANGGAL 16 Agustus 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SERUYAN TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan



Pj. BUPATI SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 dapat terselesaikan.

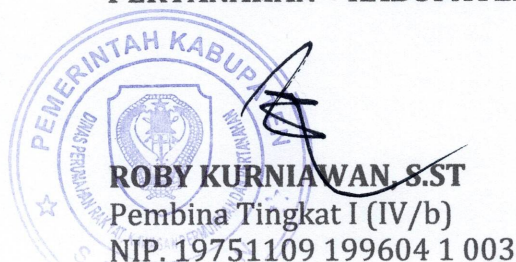
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 memuat Tujuan, Sasaran Strategis, Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, Indikator Kinerja yang diselaraskan dengan Program/kegiatan dan Anggaran yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2025.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana Kinerja tahunan dan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa selalu membimbing kita, Amin.

Kuala Pembuang, 28 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
RAKYAT KAWASAN PEMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN SERUYAN**



ROBY KURNIAWAN, S.ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19751109 199604 1 003

DAFTAR ISI		Hal
Kata Pengantar.....		i
Daftar isi.....		ii
Daftar Tabel.....		iii
Daftar Gambar.....		iii
BAB I PENDAHULUAN.....		1
1.1 Latar Belakang.....		1
1.2 Landasan Hukum		4
1.3 Maksud dan Tujuan		8
1.4 Sistematika Penulisan		9
 BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2023.....		 11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD.....		11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas.....		22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....		25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD		28
2.5 Penelaahan usulan Program Kegiatan Masyarakat.....		39
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....		 41
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional		41
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah		43
3.3 Program dan Kegiatan		44
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		 49
 BAB V PENUTUP		 85

DAFTAR TABEL		Hal
Tabel 1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	11
Tabel 2	Alokasi dan Realisasi Anggaran guna Pencapaian Sasaran	12
Tabel 3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2023.....	13
Tabel 4	Pencapaian Kinerja berkaitan dengan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	22
Tabel 5	Pencapaian Kinerja berkaitan dengan Pertanahan	23
Tabel 6	Pencapaian Kinerja berkaitan dengan SPM tahun 2023.....	24
Tabel 7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tabel 8	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025	29
Tabel 9	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.....	40
Tabel 10	Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025.....	45
Tabel 11	Rumusan rencana program kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju 2026	50

DAFTAR GAMBAR		Hal
Gambar 1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2	Keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten Kota.....	4
Gambar 3	Penanganan Kawasan Kumuh	23

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Proses Perencanaan yang baik merupakan awal bagi pembangunan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Salah satu turunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Dalam kerangka legislasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam

membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis . Dengan demikian RENJA pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan RENJA dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Renja DISPERKIMTAN tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan perencanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026. Perencanaan tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2024-2026 dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026, khususnya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Oleh karena itu dalam penyusunan RENJA DISPERKIMTAN Tahun 2025 harus selaras dengan dokumen tersebut diatas dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

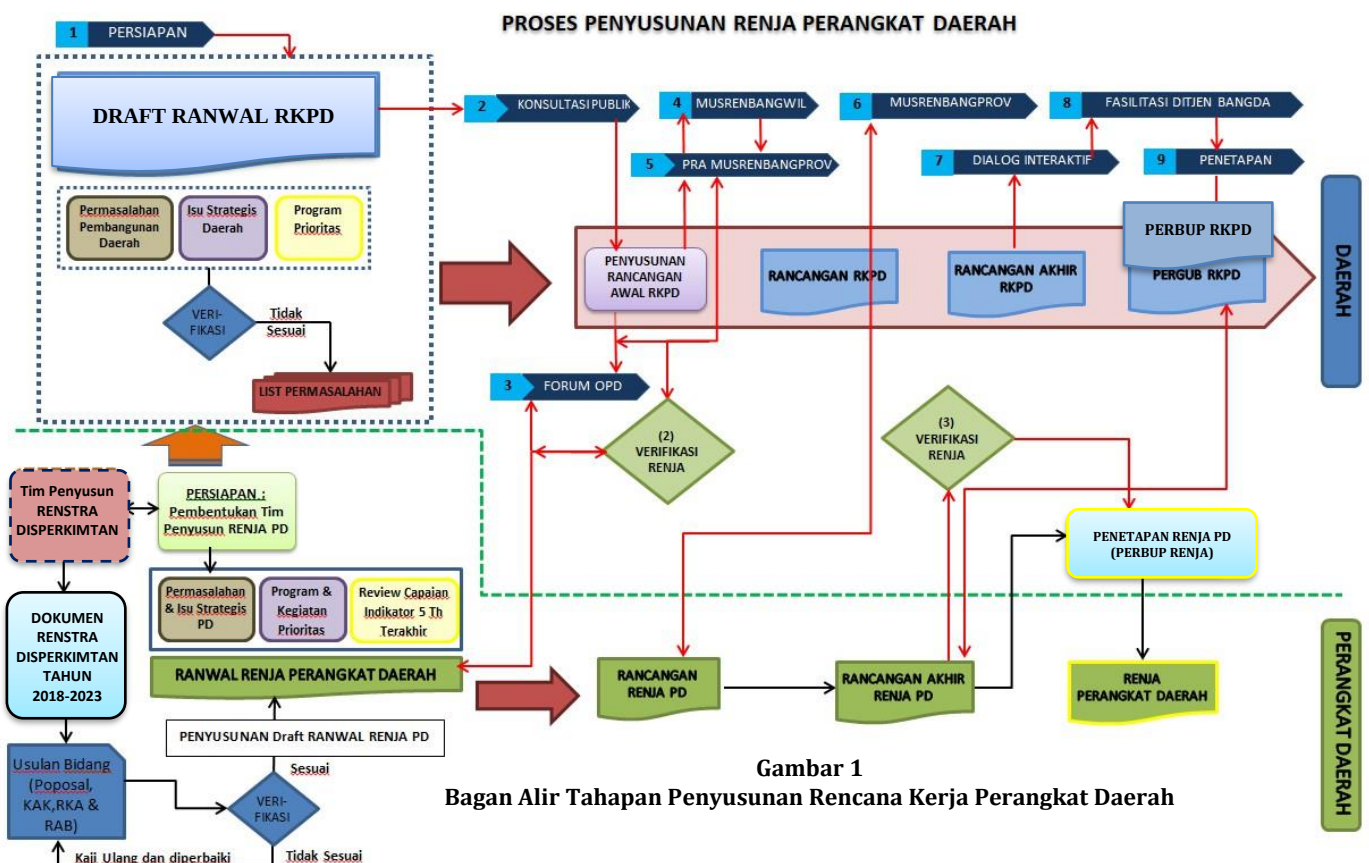
RENJA Perangkat Daerah merupakan instrument untuk melakukan pengukuran kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renja Perangkat Daerah mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

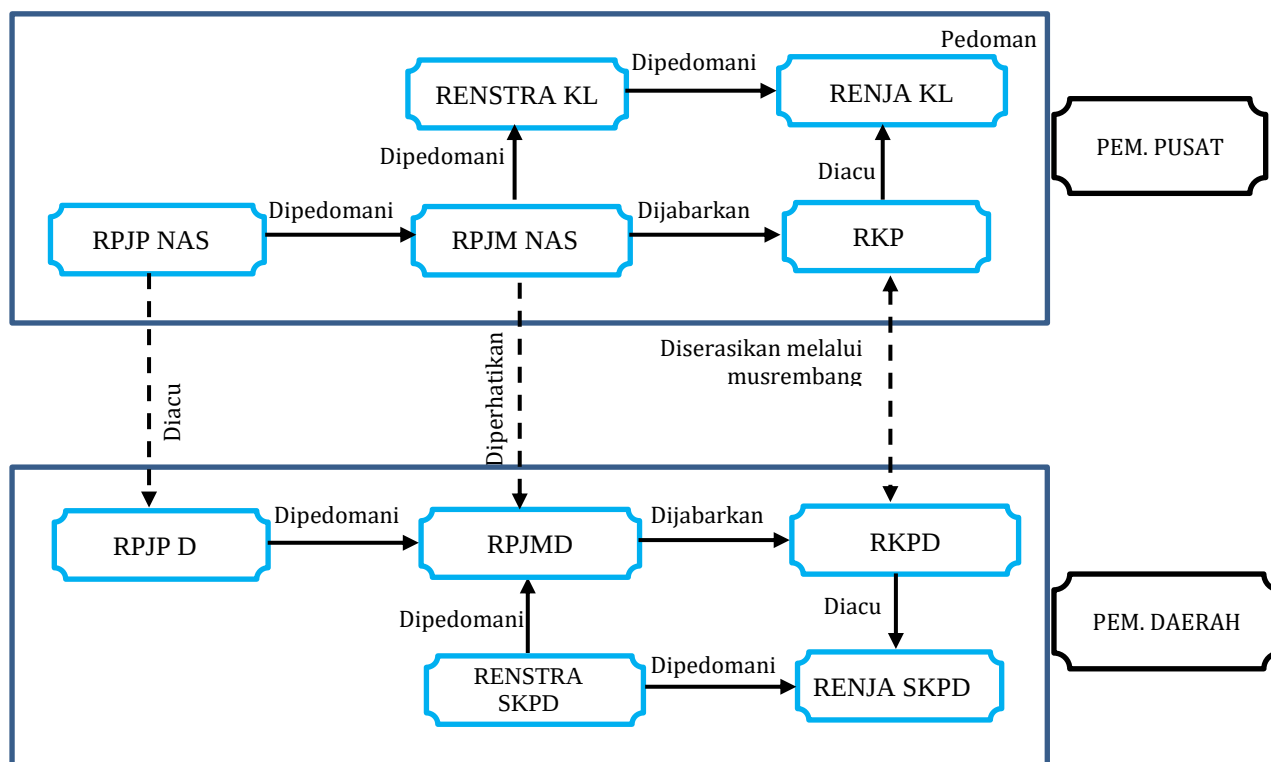
1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA Perangkat Daerah sesuai arahan Operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan dalam sub kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan dalam sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang merupakan input/masukan dalam penyusunan RAPBD;

3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Pada dasarnya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seuyan secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, yaitu dalam hal pengentasan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin seperti bantuan stimulan rumah menuju layak huni, permukiman layak huni yang didukung dengan kualitas hidup yang sehat. Terkait dengan hal tersebut perlu disusun suatu perencanaan program/kegiatan yang konseptual dan realistis yang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik ditingkat nasional maupun provinsi.

Mengingat beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun RENJA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi dasar yang objektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen target serta sasaran masa depan pada masing-masing program/kegiatan.





Gambar 2
Keterkaitan Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten Kota

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402));
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmen Nomor 400 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56);
26. Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 Nomor ungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita daerah Nomor Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 Nomor 13);

I.3 Maksud dan Tujuan

Adapun Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lingkup Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Seruyan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan tahun 2023 dan Perkiraan capaian pelaksanaan Renja tahun 2025 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Secara umum tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan adalah :

1. Menjabarkan arahan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2024-2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2025.
2. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan.
3. Untuk memasukan program/kegiatan yang ada di Renja kedalam kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 serta sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan tahun 2025.
4. Sebagai instrument pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan.
5. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan ini mengacu pada panduan tata cara penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara renja perangkat daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Pada bab ini bersisi uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat daerah juga memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Disperkimtan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Seruyan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dnas.

2.4. Reviu terhadap Rancangan awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Bab ini berisi uraian telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan kabupaten Seruyan.
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2023 dilakukan dengan melihat indikator Kinerja yang sudah ditentukan.

Anggaran belanja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan tahun 2023 direncanakan sebesar Rp. 12.381.463.453 yang terdiri dari belanja Pegawai Rp. 4.019.271.053, Belanja Barang Jasa Rp. 3.857.210.400 Belanja Bantuan Sosial Rp. 3.255.000.000 dan belanja Modal sebesar Rp. 1.249.982.000. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.986.555.845 (99,19%), Belanja barang jasa sebesar Rp. 3.343.373.543 (86,68), Belanja bantuan Sosial sebesar Rp 3.254.988.000 (100) dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.144.464.000 (91,56%).

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

(Tabel 1)

URAIAN	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
BELANJA DAERAH	12.381.463.453	11.729.381.388,00	94,73	11.821.423.159
BELANJA OPERASI	11.131.481.453	10.584.917.388,00	95,09	11.102.558.808
Belanja Pegawai	4.019.271.053	3.986.555.845,00	99,19	4.014.717.213
Belanja Barang dan Jasa	3.857.210.400	3.343.373.543,00	86,68	3.614.198.796
Belanja Bantuan Sosial	3.255.000.000	3.254.988.000,00	100,00	3.103.708.250
BELANJA MODAL	1.249.982.000	1.144.464.000,00	91,56	1.088.798.900
SURPLUS/(DEFISIT)	(12.381.463.453)	(11.729.381.388)	94,73	(11.821.423.159)

Alokasi Belanja yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seuyan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka melaksanakan 2 (dua) sasaran yang hendak dicapai adalah sebesar Rp. 7.299.476.527 Dengan rincian sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN GUNA PENCAPAIAN SASARAN

(Tabel 2)

No	Sasaran	Target Keuangan 2023	Realisasi 2023	
			Rp	%
1.	Berkurangnya Kawasan Kumuh	5.160.675.600	5.061.357.384	98,08
2.	Meningkatnya luasan Kawasan yang dapat diterbitkan sertifikatnya dengan percepatan program TORA	880.610.000	743.423.159	84,46
TOTAL		6.041.285.600	5.805.088.069	96,09

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja keuangan antara rencana dan realisasi dari 2 (dua) sasaran yang terdiri 9 Kegiatan dari 11 sub kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan adalah sebesar 96,09%.

Sedangkan untuk program yang mendukung terlaksanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan berada di Bidang Perumahan yakni Pelaksanaan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Relokasi Masyarakat terdampak Program Kabupaten/Kota dengan target keuangan Rp. 1.002.698.500 dengan realisasi Rp. 1.002.649.834 atau 99,99%. Sementara untuk program kegiatan yang bersifat rutin berada di sekretariat. Target keuangan kegiatan dimaksud Rp. 6.276.812.164 dan terealisasi sebesar Rp. 6.016.335.090 atau 95,85%.

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2023
(tabel 3)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2023 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu			Target program/ kegiatan RENJA tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Perkiraan realisasi capaian target RENSTRA sampai dengan tahun berjalan	
				Target RENJA tahun 2022	Realisasi RENJA tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2021 (%)
1	2	3	4	5	6	7=(7/6)	8	9=(5+7+9)*	10*
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Unit Kerja yang terlaksana penunjang urusan pemerintah daerah	%							
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	36 Dok	-	12 dok	12 dok		12 dok	12 dok	33,33 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dok	-	3 dok	3 dok		3 dok	3 dok	33,33 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dok	-	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	33,33 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dok	-	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	33,33 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	3 Dok	-	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	33,33 %
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi keuangannya	5 unit kerja		4 unit kerja	4 unit kerja		4 unit kerja	4 unit kerja	80 %
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	40 Pegawai		33 peg	66 peg	110 peg	33 peg	66 peg	82,50 %

Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	10 Dok	-	2 dok	2 dok		2 dok	2 dok	20 %
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	2000 buah		1.200 buah	1.200 buah		1.200 buah	1.200 buah	60 %
Penatausahaan BMD pada SKPD	Jumlah Aset yang di kelola	2000 buah	-	1.200 buah	1.200 buah		1.200 buah	1.200 buah	60 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tertangani administrasinya	85 pegawai	70	70 peg	140 peg		70 peg	140 peg	164,71 %
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah dan Jenis Pakaian dinas dan atributnya yang diadakan	260 buah	176 buah	-	241 buah	100 %	-	241 buah	92,69 %
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi Kepegawaian yang di kelola	100 Dok	-	70 dok	70 dok		70 dok	70 dok	70 %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat	100 pegawai	-	-	-		-	-	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai Bintek	150 pegawai	50 pegawai	-	50 pegawai		-	50 pegawai	33,33 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	5 unit kerja	-	4 jnis	4 jenis		4 jnis	4 jenis	80 %
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik yang disediakan	50 jenis	-	15 jenis	15 jenis		15 jenis	15 jenis	30 %
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis kantor yang diadakan	200 jenis	80 jenis	40 jenis	120 jenis		40 jenis	120 jenis	60 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Logistik Kantor yang ditetapkan	20 jenis	25 jenis	7 jenis	49 jenis	100 %	7 jenis	49 jenis	245 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60 jenis	20 jenis	2 jenis	30 jenis	100 %	2 jenis	30 jenis	50 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media koran dan majalah yang ditetapkan	75 media	25 media	5 media	45 media	100 %	5 media	45 media	60 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	650 kegiatan	200 kegiatan	135 kegiatan	435 kegiatan	100 %	135 kegiatan	435 kegiatan	66,92 %

Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	5 unit kerja		4 unit kerja	4 unit kerja		4 unit kerja	4 unit kerja	80 %
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Gedung yang dibangun	925 M3	450 M3		705 M3	100 %		705 M3	76,22 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang diadakan	444 buah	58 buah	100 buah	172 buah	100 %	100 buah	172 buah	38,74 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Panjang Pagar yang dibangun	450 M3	450 M3		525 M3	100 %		525 M3	116,67 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Panjang siring yang dibangun	450 M3	450 M3		450 M3			450 M3	100%
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani jasa Penunjang urusan pemerintahnya	5 unit kerja		4 unit kerja	4 unit kerja		4 unit kerja	4 unit kerja	80 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	6150 materai	2.325 materai	900 materai	4.375 materai	100 %	900 materai	4.375 materai	71,14 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	24 bulan	12 bulan	48 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan dibayarkannya Honor PNS dan Non PNS	60 bulan	24 bulan	12 bulan	48 bulan	100 %	12 bulan	48 bulan	80 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	5 unit kerja/Bidang		4 unit kerja	4 unit kerja		4 unit kerja	4 unit kerja	80 %
Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100 unit	31 unit	20 unit	62 unit	100 %	20 unit	62 unit	62 %
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dan yang diperbaiki	50 jenis	18 jenis	10 jenis	36 jenis	100 %	10 jenis	36 jenis	72 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	60 gedung	16 geduang	6 gedung	26 gedung	100 %	6 gedung	26 gedung	43,33 %

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH YANG DITANGANI AKIBAT BENCANA	%		75	75		75	75	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang didata yang akan direhab dan disediakan	300 Unit rumah	-	70 unit	70 unit		70 unit	70 unit	23,33 %
Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Rumah Korban Bencana yang didata	200 Unit rumah	-	50 unit	50 unit		50 unit	50 unit	25 %
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah rumah rusak yang didata	100 Unit rumah	-	20 unit	20 unit		20 unit	20 unit	20 %
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhab	120 Unit rumah		24 unit	24 unit		24 unit	24 unit	20 %
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah yang direhab	40 Unit rumah	1 unit	18 unit	20 unit	100 %	18 unit	20 unit	50 %
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah yang dibangun	40 Unit rumah	1 unit	6 unit	8 unit	100 %	6 unit	8 unit	20 %
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	Jumlah Lingkungan Perumahan yang dipelihara	250 unit	38 unit	37 unit	100 unit	100 %	37 unit	100 unit	40 %
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin yang diterbitkan	8 ijin		4 Ijin	4 Ijin		4 Ijin	4 Ijin	50 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	1 kegiatan		2 keg	100 %		2 keg	16,67 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	14 kegiatan	6 kegiatan	10 Keg	17 Keg	100 %	10 Keg	17 Keg	121,43 %
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	CAKUPAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	%		85	85		85	85	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha	Jumlah Kawasan kumuh yang ditata	10 Kec		7 Kecamatan	7 Kecamatan		7 Kecamatan	7 Kecamatan	70 %

Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah Lokasi yang disurvei dan ditetapkan sebagai permukiman kumuh	10 Lokasi	-	7 Lokasi	7 Lokasi		7 Lokasi	7 Lokasi	70 %
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Perencanaan dan Rekomendasi pencegahan Permukiman kumuh yang disusun	5 dokumen	5 Dokumen	5 dokumen	5 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	100 %
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya masyarakat yang dibentuk	100 kelompok	-	25 kelompok	25 kelompok		25 kelompok	25 kelompok	25 %
Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	60 kegiatan	-	20 kegiatan	20 kegiatan		20 kegiatan	20 kegiatan	33,33 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	12 kegiatan	14 kegiatan	25 kegiatan	39 kegiatan		25 kegiatan	39 kegiatan	325 %
Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah yang dibagikan	50 unit	-	20 unit	20 unit		20 unit	20 unit	40 %
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan permukiman kumuh yang ditingkatkan	10 kawasan	-	5 kawasan	5 kawasan		5 kawasan	5 kawasan	50 %
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah layak huni yang diperbaiki	1203 unit	255 unit	150 unit	619 unit	78 %	150 unit	619 unit	51,45 %
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	40 paket	15 paket	4 paket	19 paket		4 paket	19 paket	47,50 %
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	CAKUPAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	%		75	75		75	75	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permukiman Kumuh yang ditangani	20 kawasan		6 kawasan	6 kawasan		6 kawasan	6 kawasan	30 %

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh)Ha	Jumlah rumah tidak layak huni dan PSU yang diperbaiki	100 rumah	-	20 rumah	20 rumah		20 rumah	20 rumah	20 %
Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha	Panjang Jalan dan drainase yang dibangun	70 km	40 Km	2 Km	57 Km	100 %	2 Km	57 Km	81,43 %
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	CAKUPAN PENGELOLAAN IZIN LOKASI	%		85	85		85	85	100
Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah izin lokasi yang diberikan	10 Dok		5 Dok	5 Dok		5 Dok	5 Dok	50 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	15 kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan		5 Kegiatan	5 Kegiatan	33,33 %
PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	CAKUPAN PENETAPAN TANAH ULAYAT	%		85	85		85	85	
Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah ulayat yang ditetapkan	12 Dok		4 Dok	4 Dok		4 Dok	4 Dok	33,33 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	15 kegiatan		6 kegiatan	6 kegiatan		6 kegiatan	6 kegiatan	40 %
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan				-			-	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan				-			-	
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang penerima santunan	30 orang	2 Orang		2 Orang			2 Orang	6,67 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	10 kegiatan			-			-	-
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	CAKUPAN PENGELOLAAN TANAH KOSONG	85 %		85	85		85	85	100
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Jumlah masalah tanah kosong yang diselesaikan	9 Kasus		3 kasus	3 kasus		3 kasus	3 kasus	33,33 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	18 Kegiatan		6 kegiatan	6 kegiatan		6 kegiatan	6 kegiatan	33,33 %
Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah tanah kosong yang diinventarisasi dan dimanfaatkan	9 Bidang Tanah		3 Bidang tanah	3 Bidang tanah		3 Bidang tanah	3 Bidang tanah	33,33 %
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah inventarisasi tanah kosong	18 kegiatan		6 Kegiatan	6 kegiatan		6 Kegiatan	6 kegiatan	33,33 %
Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Tanah kosong yang dimanfaatkan	9 Bidang Tanah		3 Bidang	3 Bidang		3 Bidang	3 Bidang	33,33 %
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	CAKUPAN PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA LAHAN	%		85	85		85	85	
Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah tanah yang diterbitkan izin pembukaannya	5 Dok		3 Dok	3 Dok		3 Dok	3 Dok	60 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	93 kegiatan	26 kegiatan	6 kegiatan	32 kegiatan		6 kegiatan	32 kegiatan	34,41 %
Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah tanah negara yang dikendalikan pemanfaatannya	9 areal	-	3 areal	3 areal		3 areal	3 areal	33,33 %
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	CAKUPAN PENGGUNAAN TANAH	%		85	85		85	85	
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tanah yang hamparannya digunakan	10 Bidang Tanah		3 Bidang	3 Bidang		3 Bidang	3 Bidang	30 %

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	50 kegiatan	20 Kegiatan	6 Kegiatan	26 Kegiatan		6 Kegiatan	26 Kegiatan	52 %
Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Zona nilai tanah kewenangan kabupaten yang dipetakan	10 Dok	1 Dok	1 dok	2 dok		1 dok	2 dok	20 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	-	6 kegiatan	6 kegiatan		6 kegiatan	6 kegiatan	33,33 %
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	85 %	85	85			85		
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	30 Kasus		10 kasus	10 kasus		10 kasus	10 kasus	33,33%
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa dan konflik yang diinventarisasi	100 kegiatan	33 kegiatan	10 kegiatan	43 kegiatan		10 kegiatan	43 kegiatan	43%
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah mediasi penyelesaian sengketa tanah	40 kegiatan	2 kegiatan	20 keg	22 keg		20 keg	22 keg	55 %
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	CAKUPAN REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	85 %		85	85		85	85	100
Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan	4 Dok	-	1 dok	1 dok		1 dok	1 dok	25 %
Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah subyek dan Obyek Redistribusi tanah diinventarisasi	25 Areal	-	10 areal	10 areal		10 areal	10 areal	40 %
Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Obyek Redistribusi Tanah yang diinventarisasi dan di rekomendasi	50 Areal	-	20 areal	20 areal		20 areal	20 areal	40 %

Koordinasi Penyelenggaraan redistribusi Tanah Obyek Reforma agraria dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	18 kegiatan	-	6 kegiatan	6 kegiatan		6 kegiatan	6 kegiatan	33,33 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	30 kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan		10 kegiatan	10 kegiatan	33,33 %

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan yaitu urusan wajib pelayanan dasar Perumahan Rakyat dan Urusan wajib non Pelayanan dasar Pertanahan. Urusan ini dilaksanakan dengan 10 Program dan 15 kegiatan.

Capaian Kinerja pelayanan pada tahun 2023, indikator kinerja pelayanan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023. Dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, setelah mengacu pada indikator kinerja Utama pada RPJMD sebagai indikator yang harus dicapai Kepala Daerah, indikator ini digunakan sebagai tujuan dari Kepala Perangkat Daerah (Kepala Dinas) sebagai indikator tujuan pada sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang dikemudian dijabarkan sebagai indikator program dan indikator kegiatan.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum dalam table sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja berkaitan dengan Perumahan dan Permukiman Layak Huni (table 4)

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Berkurangnya Kawasan Kumuh	Rasio Rumah layak Huni	58,35%	72,44%
		Rasio Pemukiman layak Huni	24,78%	57,10%

Upaya untuk mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas pemukiman dilaksanakan melalui Program Perumahan dan Program Kawasan Permukiman serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Program ini memiliki indikator kinerja yaitu :

- Rasio Rumah Layak Huni dari target 58.359% dapat direalisasikan 72,44% sehingga kinerja nya mencapai 124,13 %. Hasil Pendataan Tahun 2023 ini Jumlah Rumah layak huni di Kabupaten Seruyan sebanyak 22.198 unit, dengan jumlah rumah se Kabupaten

Seruyan 27.084 unit. Pencapaian kinerja ini diperoleh dari kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2023 yang mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 15 Unit rumah, pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah oleh pemerintah Kabupaten Seruyan sebanyak 107 unit.

- Penurunan Kawasan kekumuhan dalam hal infrastruktur dapat dengan memperbaiki jalan jalan yang tidak layak menjadi layak dengan program semenisasi di beberapa desa namun pada tahun 2023 dikarenakan keterbatasan anggaran maka tidak ada pembangunan jalan hanya terdapat pemasangan PJUTS.



Gambar 3
Penanganan Kawasan Kumuh

Pencapaian Kinerja berkaitan dengan Pertanahan
(tabel 5)

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Kinerja	
			Target	Realisasi
1	Meningkatnya luasan Kawasan yang dapat diterbitkan sertifikatnya dengan percepatan program TORA	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan menurut pendaftaran pertama kecamatan	100	100 %

Upaya untuk meningkatkan luasan Kawasan yang dapat diterbitkan sertifikatnya adalah dengan mempercepat program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Usulan TORA yang dimohonkan untuk dilakukan Inventarisasi dan Verifikasi PPTKH di Kabupaten Seruyan adalah 1.724,29 ha untuk pemukiman, 2.006,67 ha untuk fasilitas Umum / fasilitas sosial dan 122.189,24 ha untuk Lahan Garapan.

Dengan dilaksanakannya Program TORA diharapkan indikator kinerja terkait pertanahan dapat dicapai.

Pencapaian Kinerja berkaitan dengan SPM tahun 2023
(tabel 6)

No	Jenis Pelayanan	Batas Waktu Pencapaian	Capaian	
			Target	Realisasi
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana kabupaten/kota	2023	18 unit	18 unit
	Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota	2023	0 unit	0 unit

Untuk dapat memenuhi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan telah menargetkan 18 unit rumah bagi korban bencana yaitu 12 unit untuk bangun baru dan 6 unit untuk rehabilitasi. Pelaksanaan Pembangunan dan rehabilitasi rumah sebagian diperuntukan bagi korban musibah kebakaran yang terjadi di Kabupaten Seruyan

Terkait penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah masih dalam tahap penetapan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini pemerintah Kabupaten Seruyan sudah mempunyai sebidang tanah untuk relokasi dimaksud yang merupakan hibah dari masyarakat.

Aadapun Indikator Kinerja Pelayan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tersaji pada table dibawah ini :

Tabel TC.30 (Tabel 7)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Analisa Catatan
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	✓		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	✓		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani		✓	75%	76,42%	78,33%	80,29	70,97%	70,97%	76,42%	78,33%	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		✓	22%	9,00%	9,50%	10%	8,04%	8,04%	9,00%	9,50%	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)		✓	n/a	2	4	6	n/a	n/a	2	4	
6	Persentase Rumah Layak Huni		✓	58,35%	57,5	60	62,50	68	68	57,5	60	
7	Rasio Permukiman Layak Huni		✓	24,78%	58,68	57,68	58,68	57,1	57,1	58,68	59,68	
8	Persentase Permukiman yang tertata		✓	35,15	36,18	36,18	37,56	85	85	86,18	87,56	
9	Persentase lingkungan permukiman kumuh		✓	22	19,58	19,45	19,17	20	20	19,58	19,45	
10	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan		✓	15,00	12,40	10,45	9,89	15	15	12,4	10,45	
11	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU		✓	80	81,97	83,34	85,55	80	80	81,97	83,34	
12	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan		✓	100%	100%	100%	100%	68	68	75	75	
13	Persentase pemohon sertifikat yang telah diselesaikan		✓	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Penyelesaian kasus tanah negara		✓	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	0 kasus	1 kasus	1 kasus	
15	Persentase luasa lahan brsertifikat		✓	5%	5%	5%	5,20%	5%	5%	5%	5,20%	
16	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		✓	3 kasus	3 kasus	4 kasus	4 kasus	4 kasus	1 kasus	4 kasus	4 kasus	

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan meneetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Seruyan memeiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman.

Berdasarkan Tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta

pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
4. Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumberdaya manusia aparatur di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan pertanahan;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Penyelenggaraan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tidak terlepas dari dasar peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan Bupati tentang penjabaran tugas dan fungsi masih dijumpai adanya tumpang tindih kewenangan pelaksanaan tugas/fungsi pada Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana bidang-bidang tersebut berkaitan dengan penyediaan infrastruktur lingkungan permukiman.

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan nomenklatur berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025, isu-isu penting yang mendasari adalah sebagai berikut :

Isu strategis Bidang Perumahan

1. Percepatan Backlog perumahan baik penghunian maupun kepemilikan yang cukup tinggi;
2. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) perumahan/permukiman seiring dengan pengembangan kawasan perumahan/permukiman;
3. Belum tercapainya capaian program pemerintah (Universal access) 100-0-100 yaitu 100 % Rumah Layak Huni, 0 % kawasan kumuh dan 100 % Jalan lingkungan dalam kondisi baik. Untuk 0% kawasan kumuh sudah tercapai.
4. Belum Optimalnya penanganan perumahan pasca bencana.
5. Belum Adanya Ketersediaan basis data perumahan yang valid, terkini (up-to-date) dan terintegrasi

Isu strategis Bidang Kawasan Permukiman

1. Pentingnya penyusunan data base sarana prasarana utilitas umum, untuk perencanaan pembangunan kawasan permukiman di Kabupaten Seruyan;
2. Pentingnya segera menetapkan ruas jalan lingkungan yang menjadi kewenangan Bidang Kawasan Permukiman untuk menghindari tumpang tindih penanganan jalan lingkungan dengan Bidang Cipta Karya dan pemerintahan desa.
3. Perubahan/Pergeseran pola tata ruang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana untuk mengimbangi rencana pengembangan infrastruktur permukiman.
4. Belum Adanya Ketersediaan basis data kawasan permukiman yang valid, terkini (up-to-date) dan terintegrasi untuk memudahkan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Seruyan.

Isu strategis Bidang Pertanahan

1. Penyediaan kebutuhan tanah untuk kepentingan umum seiring pertumbuhan pembangunan di daerah;
2. Percepatan Prgram TORA unuk merubah status tanah agar dapat diterbitkan sertifikatnya.
3. Dukungan dan kerjasama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dengan BPN dalam percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL (Pendataan Tanah Sistematis Lengkap)

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD / Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja Perubahan SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dikaitkan dengan visi dan misi yang tertuang dalam RPD 2024-2026 serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, maka fungsi dan tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan, Permukiman dan Pertanahan terkait erat dengan pencapaian Misi ke-5 yaitu *Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas*.

Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/renstra SKPD dapat dilihat pada table berikut :

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

(Tabel 8)

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RANCANGAN AWAL RKPD				RANCANGAN AKHIR RKPD			
		Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Unit Kerja yang terlaksana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Seruyan	90%	7.666.936.800	Persentase Unit Kerja yang terlaksana penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Seruyan	90%	
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun</i>	Kab. Seruyan	16 dokumen	141.100.000	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun</i>	Kab. Seruyan	9 dok	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	3 Dokumen	55.850.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	3 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Seruyan	2 Dokumen	45.750.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Seruyan	2 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Seruyan	1 Dokumen	4.500.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Seruyan	1 Dokumen	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	5 Dokumen	35.000.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	5 Dokumen	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang terlayani administrasi keuangannya	Kab. Seruyan	4 Unit	4.751.777.800	Jumlah unit kerja yang terlayani administrasi keuangannya	Kab. Seruyan	4 Unit	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	38 Pegawai	4.582.379.800	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	38 Pegawai	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Seruyan	12 Dokumen	22.000.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Seruyan	12 Dokumen	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	34.420.000	Jumlah Laporan	Kab. Seruyan	2 dokumen	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang milik Daerah yang di Kelola	Kab. Seruyan	1500 buah	52.610.000	Jumlah Barang milik Daerah yang di Kelola Jumlah Unit kerja yang terlayani administrasi keuangannya	Kab. Seruyan	1500 buah 100%	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	15.500.000	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	12 laporan	37.110.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Seruyan	2 Laporan	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang tertangani administrasinya	Kab. Seruyan	70 Pegawai	363.278.000	Jumlah pegawai yang tertangani administrasinya	Kab. Seruyan	70 Pegawai	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	160 stell	132.000.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	160 stell	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	80 Dokumen	19.410.000	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan	Kab. Seruyan	80 Dokumen	

						Administrasi Kepegawaian			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	6 kegiatan	9.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Seruyan	6 kegiatan	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	5 pegawai	29.668.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	5 pegawai	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	10 pegawai	172.700.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	10 pegawai	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	Kab. Seruyan	4 Unit	620.938.000	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	Kab. Seruyan	4 Unit	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	15 paket	10.240.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	15 paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	40 paket	113.403.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	40 paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 paket	12.500.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 paket	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		20 paket	147.395.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah		20 paket	

						Tangga yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	6 paket	10.000.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	6 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	15 dokumen	12.400.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	15 dokumen	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		8 paket	24.500.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		8 paket	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Seruyan	135 dokumen	290.500.000	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Seruyan	135 dokumen	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan	Kab. Seruyan	30 Unit	495.000.000	Jumlah Peralatan Mesin yang diadakan	Kab. Seruyan	30 Unit	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 unit	310.000.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Seruyan	10 unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	100 buah	185.000.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	100 buah	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani jasa Penunjang urusan pemerintahnya	Kab. Seruyan	4 Unit	933.248.000	Jumlah unit kerja yang teryalani jasa Penunjang urusan pemerintahnya	Kab. Seruyan	4 Unit	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	500 laporan	14.300.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	500 laporan	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	48 laporan	166.170.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	48 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 laporan	752.778.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Seruyan	50 Unit	308.985.000	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kab. Seruyan	50 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	20 unit	242.340.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	20 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	50 unit	41.690.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Seruyan	50 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	6 unit	24.955.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	6 unit	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PERSENTASE RUMAH YANG DITANGANI AKIBAT BENCANA	Kab. Seruyan	90%	1.065.576.000	PERSENTASE RUMAH YANG DITANGANI AKIBAT BENCANA	Kab. Seruyan	90%	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah yang didata akibat bencana	Kab. Seruyan	10 unit	148.500.000	Jumlah rumah yang didata akibat bencana	Kab. Seruyan	10 unit	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	4 laporan	65.000.000	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi	Kab. Seruyan	4 laporan	

						Program Kabupaten/Kota			
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Seruyan	4 dokumen	83.500.000	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kab. Seruyan	4 dokumen	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhab	Kab. Seruyan	24 unit	840.764.000	Jumlah Rumah yang dibangun dan direhab	Kab. Seruyan	24 unit	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Seruyan	15 unit	495.560.000	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kab. Seruyan	15 unit	
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	5 ha	150.000.000	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	5 ha	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Seruyan	10 unit	195.204.000	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Seruyan	10 unit	
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Seruyan	4 ijin	76.112.000	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Seruyan	4 ijin	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Seruyan	4 laporan	76.312.000	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kab. Seruyan	4 laporan	

	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	RASIO PERMUKIMAN LAYAK HUNI	Kab. Seruyan	85%	2.054.614.000	RASIO PERMUKIMAN LAYAK HUNI	Kab. Seruyan	85%	
	<i>Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	Jumlah Laporan Kawasan kumuh yang ditata dan tingkatkan		1 dokumen	98.864.000	Jumlah Laporan Kawasan kumuh yang ditata dan tingkatkan		1 dokumen	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1 dokumen	98.864.000	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		1 dokumen	
	<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha10 (Sepuluh) Ha</i>	Jumlah Kawasan pemukiman kumuh yang ditingkatkan	Kab. Seruyan	5 kawasan	1.955.750.000	Jumlah Kawasan pemukiman kumuh yang ditingkatkan	Kab. Seruyan	5 kawasan	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Seruyan	30 unit	455.750.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kab. Seruyan	30 unit	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Kab. Seruyan	40 unit	1.500.000.000	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Kab. Seruyan	40 unit	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PERKOTAAN	Kab. Seruyan	85%	562.000.000	PERSENTASE LUASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KAWASAN PERKOTAAN	Kab. Seruyan	85%	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Permukiman diluar Kawasan Kumuh yang ditangani	Kab. Seruyan	6 kawasan	562.000.000	Jumlah Permukiman diluar Kawasan Kumuh yang ditangani	Kab. Seruyan	6 kawasan	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Kab. Seruyan	20 rumah	357.000.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Kab. Seruyan	20 rumah	

	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki							
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kab. Seruyan	2 dokumen	205.000.000	Jumlah Dokumen Kesepakatan	Kab. Seruyan	2 dokumen	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	CAKUPAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Seruyan	80%	394.352.000	CAKUPAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kab. Seruyan	80%	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU Perumahan yang di selenggarakan	Kab. Seruyan	10 paket	125.000.000	Jumlah PSU Perumahan yang di selenggarakan	Kab. Seruyan	10 paket	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Seruyan	3 lokasi	125.000.000	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kab. Seruyan	3 lokasi	
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Kab. Seruyan	85%	64.830.000	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Kab. Seruyan	85%	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Kab. Seruyan	10 Kasus	64.830.000	Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan	Kab. Seruyan	10 Kasus	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	5 dokumen	24.830.000	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	5 dokumen	

	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	3 Berita Acara	40.000.000	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi	Kab. Seruyan	3 Berita Acara	
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	Kab. Seruyan	85%	64.926.000	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan	Kab. Seruyan	85%	
	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah	Kab. Seruyan	4 Dokumen	64.926.000	Jumlah dokumen Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan santunan Tanah	Kab. Seruyan	4 Dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kab. Seruyan	4 dokumen	64.926.000	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Kab. Seruyan	4 dokumen	
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Cakupan Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente	Kab. Seruyan	85%	549.896.000	Cakupan Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente	Kab. Seruyan	85%	
	<i>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan	Kab. Seruyan	1 Dokumen	549.896.000	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan	Kab. Seruyan	1 Dokumen	
	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	4 dokumen	269.998.000	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	4 dokumen	

	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 dokumen	279.958.000	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 dokumen	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	CAKUPAN PENGGUNAAN TANAH	Kab. Seruyan	85%	601.293.200	CAKUPAN PENGGUNAAN TANAH	Kab. Seruyan	85%	
	<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>	Jumlah tanah yang hamparannya digunakan	Kab. Seruyan	<i>3 Bidang Tanah</i>	<i>601.293.200</i>	Jumlah tanah yang hamparannya digunakan	Kab. Seruyan	<i>3 Bidang Tanah</i>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Seruyan	10 Laporan	81.443.200	Jumlah Laporan	Kab. Seruyan	10 Laporan	
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi			438.100.000	Jumlah Dokumen	Kab. Seruyan	20 dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan				81.750.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	Kab. Seruyan	12 dokumen	

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Masyarakat

Pada Tahun 2023 usulan Program Kegiatan Masyarakat Sebagian telah diakomodir oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan yang diusulkan melalui Desa atau Kelurahan yang kemudian dilaksanakan dengan Musrembang Desa, Hasil Musrembang Desa disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang kemudian dilakukan Evaluasi Kelayakan usulan tersebut dengan memutuskan usulan mana yang nantinya akan dimasukkan dalam Musrembang Kabupaten dalam hal ini oleh Bappeda Kabupaten Seruyan.

Usulan Program oleh masyarakat meliputi Program Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni baik yang meliputi Pembangunan Rumah Baru atau Rehabilitasi Rumah/Peningkatan Kualitas Rumah menjadi layak huni , Program pembangunan Rumah Musibah kebakaran yang terjadi diwilayah Kabupaten Seruyan serta Inventarisasi dan Verifikasi usulan Program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar status tanah masyarakat dapat diterbitkan Sertifikat.

Pada Tahun 2025 usulan Masyarakat baik melalui Musrembang Desa atau Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Seruyan masih sama dengan tahun tahun sebelumnya yakni usulan Program Rumah Tidak Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Antisipasi Bencana Alam dan Musibah Kebakaran serta usulan Program TORA. Untuk Mengakomodir usulan tersebut Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah merencanakannya melalui Pembangunan Rumah Baru, Rehabilitasi Rumah dan Bantuan Bahan Bangunan. Untuk Program TORA dilaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi agar usulan tersebut dapat segera diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Usulan Program Kegiatan oleh Masyarakat dan pemangku kebijakan disajikan pada table berikut ini :

Tabel T-C.32. (Tabel 9)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Pemerintah Kabupaten Seruyan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Lokasi	Jumlah Unit	catatan Analisa
1	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	CAKUPAN REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			Masih menunggu proses Musrembang desa dan Pokir DPRD
2	<i>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota</i>	Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah yang ditetapkan			Masih menunggu proses Musrembang desa dan Pokir DPRD
3	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Masih menunggu proses Musrembang desa dan Pokir DPRD
4	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	CAKUPAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
5	<i>Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	Jumlah Pemukiman diluar kawasan Kumuh yang ditangani			
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			Masih menunggu proses Musrembang desa dan Pokir DPRD
24	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	CAKUPAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
25	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemukiman diluar kawasan Kumuh yang ditangani			Masih menunggu proses Musrembang desa dan Pokir DPRD

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Kebijakan Nasional perumahan dan kawasan permukiman yang termaktub dalam pasal-pasal berikut:

- Bab II.2 Huruf D 5: Memenuhi kebutuhan hunian bagi Masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- Bab IV.1.5. Butir 19: Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada penyelenggaraan pembangunan perumahan yang terjangkau daya beli masyarakat

Arah kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang diamanatkan dalam Undang - Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana, sarana, permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, efisien.
- b. Penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan
- c. Pembangunan Perumahan beserta prasarana, sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, pembangunan perumahan tercantum pada pasal 129 huruf a yaitu: Dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Amanat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman untuk Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai pasal 15 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- d. Menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- e. Melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan Industri bahan bangunan yang mengutamakan sumberdaya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- g. Melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- h. Melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- i. Melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- j. Melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;

- k. Melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- n. Memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- o. Menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba; dan
- p. Memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran

3.2.1. Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Seruyan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan kabupaten ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan untuk lima tahun ke depan menetapkan tujuan yakni dapat memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Infrastruktur Dasar bagi seluruh masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, indah, teduh dan nyaman yang berwawasan lingkungan.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki

indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Seruyan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor: 8 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2025 mencakup 8 program 19 Kegiatan dan 48 sub kegiatan yang ditampilkan pada tabel berikut :

**Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025
(tabel 10)**

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1	04	01	2.01		<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	04	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1	04	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	04	01	2.02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	04	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
1	04	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
1	04	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
1	04	01	2.05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
1	04	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
1	04	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
1	04	01	2.06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
1	04	01	2.06	08	Penyediaan Bahan/Material
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	04	01	2.07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>
1	04	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	04	01	2.08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1	04	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1	04	02	2.01		<i>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.01	03	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
1	04	02	2.03		<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
1	04	02	2.06		<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1	04	03	2.02		<i>Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>
1	04	03	2.02	03	<i>Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</i>
1	04	03	2.03		<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</i> <i>10 (Sepuluh) Ha</i>
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
1	04	03	2.03	05	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1	04	04	2.01		<i>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</i>
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	10	05	2.01		<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
2	10	06	2.01		<i>Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Daerah Kabupaten/ Kota</i>
2	10	06	2.01	1	Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah
2	10	06	2.01	2	Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2	10	10	2.01		<i>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</i>
2	10	10	10	02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
					Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota
2	10	17			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2	10	17	7.01		<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.</i>
2	10	17	7.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025⁴ mengajukan Usulan sebanyak 8 Program 19 kegiatan dan 48 Sub Kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 13.024.484.000 yang secara detail kami sajikan pada tabel 10 berikut ini :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. SERUYAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						13.024.424.000,00							13.622.403.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.743.478.800,00							12.376.457.800,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						11.743.478.800,00							12.376.457.800,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	-			95 %	7.667.467.380,00						-	7.766.936.800,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	-			11 dokumen 98 %	141.162.000,00			-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan	-	141.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	55.815.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		55.850.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	45.697.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		45.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		4.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	35.150.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		35.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang terlayani administrasi keuangannya	-			4 unit kerja	4.752.234.986,00			-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan	-	4.851.777.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	4.695.835.986,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		4.795.357.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	21.984.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		22.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	34.415.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		34.420.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah unit krja yang terlayani administrasi barang Milik Daerah	-			4 unit kerja	51.600.000,00			-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan	-	52.610.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	14.490.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		15.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	37.110.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		37.110.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang tertangani administrasinya	-			80 pegawai	364.171.900,00			-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan	-	363.278.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				160 Paket	133.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		132.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				80 Dokumen	19.366.900,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		19.410.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				6 Dokumen	9.479.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		9.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	29.598.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		29.668.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	172.728.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		172.700.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang teryalani administrasi umumnya	-			4 unit kerja	620.937.600,00			-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan	-	620.938.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	10.240.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		10.240.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				40 Paket	113.402.600,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		113.403.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	12.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		12.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	147.394.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		147.395.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	10.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	12.400.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		12.400.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				8 Paket	24.500.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		24.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				135 Laporan	290.501.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		290.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang yang didakan	-			20 Unit	495.290.000,00			-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan	-	495.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				10 Unit	310.290.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		310.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	185.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		185.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang tersedia jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-			4 unit kerja	933.085.894,00			-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan	-	933.248.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500 Laporan	14.300.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		14.300.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	166.169.894,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		166.170.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	752.616.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan		752.778.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	-			80 unit	308.985.000,00			-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Pegawai pada Disperkimtan	-	308.985.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				20 Unit	242.340.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		242.340.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	41.690.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mempercepat at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan		41.690.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				6 Unit	24.955.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pegawai pada Disperkimtan	24.955.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<i>Persentase rumah yang ditangani akibat bencana</i>	90 %			90 %	1.065.536.000,00						90 %	1.065.576.000,00			
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah rumah yang didata akibat bencana</i>	-			20 Dokumen	148.494.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat terdampak bencana	-	148.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>				4 Dokumen	83.494.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Masyarakat terdampak bencana		83.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Masyarakat terdampak bencana		65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi akibat bencana dan relokasi program kabupaten kota</i>	-			24 unit	840.762.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat terdampak bencana	-	840.764.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana																
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>				15 Unit Rumah	495.560.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat terdampak bencana		495.560.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>				10 Unit Rumah	345.202.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat terdampak bencana		345.204.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Jumlah izin pembangunan dan pengembangan perumahan yang diterbitkan</i>	-			4 ijin	76.280.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pengembang Perumahan	-	76.312.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				4 Laporan	76.280.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pengembang Perumahan	76.312.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	CAKUPAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	85 %			85 %	2.054.614.000,00						85 %	2.280.695.000,00			
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah Laporan Kawasan kumuh yang ditata dan tingkatkan</i>	-			4 Dokumen	98.864.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat	-	98.864.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>				4 Dokumen	98.864.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Masyarakat		98.864.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah Kawasan pemukiman kumuh yang ditingkatkan kualitasnya</i>	-			5 kawasan	1.955.750.000,00			-	Mempercep at kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan kompre hensif dalam rangka peni ngkatan daya dukung terhadap p embanguna n daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangun an daerah	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	2.181.831.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>				15 Unit Rumah	455.750.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		455.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
			<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>				20 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		1.726.081.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	CAKUPAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-			85 %	561.931.000,00						-	682.500.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah perumahan dan kawasan kumuh yang dicegah</i>	-			6 kawasan	561.931.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	682.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>				20 Unit Rumah	356.931.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat Berpenghasilan Rendah		457.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.04.2.01.0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</i>				4 Laporan	205.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat Berpenghasilan Rendah	225.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN			
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	CAKUPAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	80 %			80 %	393.930.420,00						80 %	580.750.000,00			
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<i>Jumlah PSU Perumahan yang di selenggarakan</i>	-			10 paket	393.930.420,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat	-	580.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>				3 Lokasi	124.709.600,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat		155.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																
			<i>Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan</i>				2 Lokasi	269.220.820,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat		425.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.280.945.200,00							1.245.945.200,00			
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						1.280.945.200,00							1.245.945.200,00			
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	<i>Persentase Penyelesaian sengketa tanah garapan</i>	85 %			85 %	64.830.000,00						85 %	64.830.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sengketa tanah garapan yang diselesaikan</i>	-			5 kasus	64.830.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pihak yang bersengketa	-	64.830.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	2.10.04.2.01.0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				5 Berita Acara	24.830.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pihak yang bersengketa		24.830.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				3 Berita Acara	40.000.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Pihak yang bersengketa		40.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
2.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	<i>Persentase ganti kerugian dan santunan tanah yang diselesaikan</i>	85 %			85 %	64.926.000,00						85 %	64.926.000,00			
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen masalah ganti kerugian dan santunan tanah</i>	-			5 Dokumen	64.926.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Mayarakat yang menerima ganti kerugian dan santunan	-	64.926.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	64.926.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Mayarakat yang menerima ganti kerugian dan santunan		64.926.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
3.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	CAKUPAN REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	85 %			85 %	549.896.000,00						85 %	579.896.000,00			
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	CAKUPAN REDISTRIBUSI TANAH SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE <i>Jumlah Subyek dan Obyek Redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan tanah maksimum dan tanah abstentee yang ditetapkan</i>	-			85 % 1 Dokumen	549.896.000,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat	-	579.896.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	2.10.06.2.01.0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			<i>Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	279.958.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat		309.958.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	2.10.06.2.01.0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah																
			<i>Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				4 Dokumen	269.938.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat		269.938.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
4.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	CAKUPAN PENGGUNAAN TANAH	85 %			85 %	601.293.200,00						85 %	536.293.200,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah tanah yang hamparan digunakan dalam satu kabaten/kota</i>	-			3 bidang tanah	601.293.200,00			-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha	-	536.293.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah																
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				10 Laporan	81.443.200,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		81.443.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya				20 Dokumen	438.100.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		363.100.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	81.750.000,00	Kab. Seruyan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah 05. Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	Masyarakat dan Pelaku Usaha		91.750.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
	J U M L A H							13.024.424.000,00							13.622.403.000,00			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang sejalan dengan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menerangkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Harapan kami, Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan Tahun 2025, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan permukiman pada Tahun 2025 serta dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka akuntabilitas dan transparansi kepada seluruh stakeholders, serta dasar dalam mengukur keberhasilan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi.

Kepala Dinas Prumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Seruyan



ROBY KURNIAWAN, S.ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19751109 199603 1 004